

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GERAKAN MASYARAKAT MAGRIB MENGAJI

Ganda Ade Saputra, Zaili Rusli dan Harapan Tua

Program Studi Magister Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl.H.R. Soebrantas,Km 12,5 Panam Pekanbaru, 28293

Abstract: Policy Implementation of the Magrib Mengaji Community Movement. This study aims to determine the implementation of the movement of the Koran Maghreb movement in Bangkinang District. The research informants consisted of Officials and Staff of the Ministry of Religion of Kampar Regency, Kesra of Kampar District, Ulama and Community Stores. Data is collected through interviews, observation and documentation. Data analysis based on phenomenological philosophy that emphasizes *verstehen*. The results of this study indicate that the implementation of the community movement policy to study is still there are several problems including low supervision, low community participation. There is no clarity of sanctions for parties who violate, uneven distribution of the budget. Implementation of Regional Regulations for the Movement of Magriby Community Religion is influenced by several factors, namely the policy content factor where there is an interest from the target group, the type of benefits, the degree of change desired and the location of decision making and the community involved.

Keywords: implementation, policies, community movements, magrib reciting

Abstrak: Implementasi Kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan gerakan masyarakat Magrib Mengaji di Kecamatan Bangkinang. Informan penelitian terdiri Pejabat dan Staf Kementerian Agama Kabupaten Kampar, Kesra Kabupaten Kampar, Ulama dan Toko Masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data berdasarkan filsafat fenomenologis yang mengutamakan *verstehen*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan gerakan masyarakat mengaji masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya rendahnya pengawasan, rendahnya partisipasi masyarakat. Tidak adanya kejelasan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar, tidak meratanya distribusi anggaran. Pelaksanaan Peraturan Daerah Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji dipengaruhi beberapa faktor yaitu faktor isi kebijakan dimana adanya kepentingan dari kelompok sasaran, tipe manfaat, derajat perubahan yang di inginkan dan letak pengambilan kerutusan serta masyarakat yang dilibatkan.

Kata kunci: implementasi, kebijakan, gerakan masyarakat, magrib mengaji

PENDAHULUAN

Implementasi Kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji didasarkan oleh mayoritas masyarakat di Kabupaten Kampar Beragama Islam dengan *persentase* 90% (620.459 orang). Kabupaten Kampar memiliki budaya mengaji selepas magrib. Mengaji merupakan salah satu aktifitas ibadah yang sangat lekat dengan masyarakat Kampar. Sejumlah rumah ibadah seperti surau, mushalla, langgar, masjid dan lain-lain senantiasa diramaikan dengan kegiatan mengaji, khususnya di waktu Maghrib.

Seiring dengan semakin berkembangnya kemajuan zaman, kegiatan mengaji selepas magrib mulai mengalami pergeseran dari surau, mushalla, langgar dan masjid bergeser ke ruang keluarga dengan menonton acara-acara televisi atau mereka beralih ke warung-warung internet maupun warung *game* 24 jam waktunya seolah habis untuk menonton atau bermain di ruang maya tanpa makna. Mengaji yang biasa dilakukan sehabis sholat terutama se usai sholat maghrib tidak lagi menjadi kegiatan rutin yang membanggakan, melainkan se-

baliknya, seolah menjadi hantu yang harus di hindari „*anak-anak sudah menjauh dari Rumah Allah*“.

Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Arus modernisasi zaman dan perkembangan media masa elektronik pada saat ini telah melahirkan pergeseran nilai, budaya, kultur dan tradisi masyarakat, baik di perkotaan dan lebih-lebih di pedesaan. Akibatnya telah melahirkan perubahan sosial yang sangat signifikan ditengah-tengah masyarakat, imbasnya tradisi baik pada kelompok masyarakat pada saat ini telah tergerus oleh asupan budaya dan nilai-nilai yang berseberangan dengan kondisi dan tradisi masyarakat Indonesia seperti budaya Maghrib mengaji.

Pergeseran dan perubahan sosial yang terjadi pada salah satu unsur kebudayaan akan menyebabkan perubahan pada unsur-unsur lain. Dapat diyakini bahwa perubahan sosial cenderung berkonotasi negatif, karena dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial sekaligus juga bisa menjadi masalah sosial. Pergeseran budaya mengaji yang biasa dilakukan sehabis salat Maghrib telah mulai ditinggalkan oleh sebagian besar masyarakat kampar. Hal ini disebabkan oleh lingkungan yang cenderung meninggalkan kebudayaan mengaji dan memunculkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak bermanfaat, seperti manin domino, duduk-duduk di pinggir jalan.

Perubahan sosial terjadi dengan sangat cepat dan efek negatifnya pun akan sangat besar pada lingkungan masyarakat, baik di pedesaan maupun di perkotaan, bila hal ini tidak segera diantisipasi dan dicarikan solusi tepat, maka anak-anak kita yang akan menjadi korbannya. Untuk menjawab kondisi perubahan dan pergeseran tersebut, diperlukan upaya, solusi dan langkah konstruktif untuk menghidupkan dan mengembalikan kembali sebuah tradisi baik dan mengakar ditengah-tengah masyarakat Muslim di kabupaten kampar, yaitu,

Melalui Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji.

Gerakan Mengaji pada waktu Maghrib adalah langkah efektif untuk membendung budaya global dan pengaruh negatif tayangan TV. Gerakan Maghrib Mengaji merupakan langkah strategis dalam menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini hampir dilupakan. Misalnya, shalat berjama'ah di masjid, di mushola/surau, langgar dan budaya mengaji setelah shalat Maghrib.

Pemerintah Kabupaten kampar membuat peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 02 tahun 2013 tentang Kebijakan Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji dikarenakan saat ini gaung islami dan gema wahyu ilahi di masjid-masjid di waktu maghrib pun sudah semakin sayup terdengar. Anak-anak muda masih bermain gitar dan nongkrong di jalanan, tidak peduli waktu maghrib dan mereka asyik dengan permainannya.

Melihat gambaran diatas Pemerintah serius untuk mengambil satu langkah. Dalam konteks Local, Pemerintah Kabupaten Kampar telah membuat rumusan-rumusan pokok kebijakan. Dengan adanya rumusan pokok kebijakan tersebut, maka pemerintah kabupaten Kampar melahirkan sebuah kebijakan program “Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji” yang terancangkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 7 tahun 2015 tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Kabupaten Kampar akan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak mengalami hambatan-hambatan untuk mencapai tujuan tersebut. Sehubungan dengan fenomena tersebut, maka permasalahan penelitiannya adalah bagaimana implementasi kebijakan gerakan masyarakat Maghrib Mengaji di Kecamatan Bangkinang?.

Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan

atau sasaran yang ingin di capai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya (Solichin, 2005).

Menurut Gaffar (2009), implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Sedangkan menurut teori Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2008) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Adapun implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan
3. Adanya hasil kegiatan

Menurut Grindle 1980 (dalam Sujianto 2008) mengatakan bahwa implementasi kebijakan sesungguhnya bukan hanya sekedar berhubungan dengan mekanisme penjabaran atau operasional dari keputusan politik kepada prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi melainkan lebih dari itu, yaitu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang akan memperoleh apa dari suatu kebijakan. Pendekatan Meriee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011) dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Procces*. Menurut Grindle ada 2 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu:

Sedangkan keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan menurut Weimer dan Vining (dalam pasolong, 2007), ada tiga faktor umum yang mem-

pengaruhi keberhasilan yakni sebagai berikut:

1. Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan. Maksudnya adalah sampai berapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.
2. Hakekat kerjasama yang dibutuhkan. Maksudnya adalah apakah semua pihak yang terlibat dalam kerjasama telah merupakan suatu assembling produktif.
3. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya.

Menurut M. Irfan Islami (2003) beberapa kebijakan bersifat self-executing artinya dengan dirumuskan kebijakan itu sekaligus (dengan sendirinya) kebijakan implementasikan. contohnya adalah :

1. Kebijakan suatu Negara yang mengakui secara formal kemerdekaan Negara baru.
2. Pergantian atau perubahan lambang Negara, lagu Negara, bendera Negara

Sementara itu menurut Edward (dalam Winarno, 2002) implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang di implementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. Implementasi merupakan sebuah tahap yang paling krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus di implementasikan agar supaya mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Menurut Wiliam. N. Dun (2003) menganjurkan bahwa disetiap taha-

pan proses kebijakan publik, termasuk tahapan implementasi kebijakan penting dilakukan analisa. Analisa yang dimaksud tidak identik dengan evaluasi karena dari tahapan penyusunan agenda hingga evaluasi kebijakan (*policy evaluation*) sudah harus dilakukan analisis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kecamatan Bangkinang.

METODE

Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian kualitatif. Informan penelitian terdiri dari Kabag Kesra, Staf Kesra DPRD Kabupaten Kampar, Kepala dan Kabag Penyuluhan, Kementerian Agama Kabupaten Kampar, Camat, Ulama, dan Toko Masyarakat. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data berdasarkan filsafat fenomenologis yang mengutamakan *verstehen*.

HASIL

Isi Kebijakan

Kepentingan Kelompok Sasaran

Pihaknya telah memberikan penjelasan kepada masyarakat baik secara lisan maupun tulisan terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 tahun 2013 Tentang Kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kecamatan Bangkinang, namun memang masih belum maksimal di karenakan masih banyak kendala-kendala lain, dan apabila di kaitkan dengan SOP maka hal ini masih sangat jauh sekali, banyak hal yang harus dilakukan untuk.

Tipe manfaat

Gerakan Maghrib Mengaji' yang telah dibahas oleh DPRD setempat memiliki lima tujuan utama dan sangat bermanfaat dalam membentuk moral generasi muda menjadi agamis, perkembangan zaman saat ini membawa dampak negatif bagi pertumbuhan generasi muda, krisis moral sudah berada pada posisi yang sangat mempriha-

tinkan, anak tidak lagi menghormati orang tuanya, etika moral mulai terkikis dan narkoba merajalela sampai ke pelosok dusun.

Derajat Perubahan yang Diinginkan

Berdasarkan hasil rapat Kementerian Agama Kabupaten Kampar dengan Pemkab Kampar dan DPRD Kampar dipaparkan betapa pentingnya untuk mewujudkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 tahun 2013 Tentang Kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji. Hal ini didasarkan bahwa sebagai masyarakat Kabupaten Kampar yang mayoritas Umat Muslim mengaku sebagai serambi mekkahnya Provinsi Riau. Oleh karena itu, mari kita dukung perda ini dengan hati yang tulus, jiwa yang lapang dan fikiran yang jernih agar perda ini bisa terwujud dan kita laksanakan dalam kehidupan bermasyarakat.

Letak Pengambilan Keputusan

Letak pengambilan keputusan terdapat pada dukungan masyarakat serta partisipasi dari kelembagaan lokal yang sangat dibutuhkan. Karena mereka lah yang langsung berhubungan dengan kelompok sasaran. Sikap pelaksana dalam menjalankan program serta tugas-tugas untuk mencapai tujuan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Mengaji. Untuk itu agama memandang suatu lembaga yang paling kuat untuk mempengaruhi perilaku masyarakat. Karena agama sangat penting untuk menentukan arah tingkah laku masyarakat.

Sumberdaya yang Dilibatkan

Jumlah sumberdaya yang tersedia untuk implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 tahun 2013 Tentang Kebijakan Gerakan Masyarakat Maghrib telah dilakukan pembinaan. Dimana sumberdaya tersebut di wakili oleh Pemerintah Daerah, PNS, Non PNS Maupun Pemerintah Desa, RT maupun RW Serta penyuluh Agama di Kecamatan Bangkinang

Lingkungan Implementasi Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Kurangnya koordinasi antara Kemnag Kampar dengan Pemerintah Kecamatan sehingga mereka cenderung bekerja sendiri-sendiri, perlu ada upaya pembenahan dalam manajemen ini, informasi dan data tetap harus berjalan dengan sebagaimana mestinya. Selain itu kelancaran informasi perlu mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 tahun 2013 Tentang Kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kecamatan Bangkinang. Pasalnya hal ini menjadi problem yang sulit diatasi oleh mereka, Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 tahun 2013 Tentang Kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kecamatan Bangkinang perlu dilakukan sosialisasi sebagai salah satu wujud dari informasi oleh pemerintah kabupaten Siak dan kepada seruh pihak yang berkepentingan.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Peraturan Daerah Gerakan Magrib Mengaji ini membutuhkan dukungan dan sikap positif dari para pelaksana, karena para pelaksanalah yang langsung berhubungan dengan kelompok sasaran. Untuk itu pentingnya sebuah sikap pelaksana dalam menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 tahun 2013 Tentang Kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji tidak hanya berupa dukungan matereril, akan tetapi dukungan moril yang akan menumbuhkembangkan kreativitas dari para pelaksana itu sendiri, terutama dalam meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Gerakan Magrib Mengaji.

Pentingnya keikutsertaan para pelaksanaan Peraturan Daerah dalam memberikan dukungan guna membantu pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 tahun 2013 Tentang Kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kecamatan Bangkinang dapat berjalan lancar dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Ketegasan dan kejelasan sanksi merupakan salah satu hal yang sangat berkontribusi dan terciptanya masyarakat Agamis di Kecamatan Bangkinang.

Faktor tenaga pengajar dan dana insentif dalam melaksanakan kebijakan gerakan masyarakat magrib mengaji sangat berperan dalam kelancaran proses pelaksanaan kegiatan agar pencapaian tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai dengan maksimal dan sesuai dengan yang diinginkan. Anggaran yang digunakan untuk kelancaran kegiatan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji adalah anggaran operasional. Anggaran operasional adalah biaya dalam merencanakannya kebutuhan, anggaran operasional ini adalah untuk biaya intensif tenaga pengajar Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji.

Dalam Implementasi Kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kecamatan Bangkinang ternyata masih ditemukan hambatan-hambatan antara lain :

Kepentingan Kelompok Sasaran

Kepentingan Kelompok Sasaran berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

Tipe manfaat

Tipe Manfaat menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Dalam hal ini Struktur Birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan ini.

Derajat Perubahan yang Diinginkan

Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. Content of policy yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas.

Letak Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Apakah letak sebuah program sudah tepat.

Sumberdaya yang Dilibatkan

Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat

Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para actor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh hasilnya dari yang diharapkan.

Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

SIMPULAN

Implementasi kebijakan gerakan masyarakat mengaji masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya Rendahnya pengawasan terhadap implementasi Kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kecamatan Bangkinang. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mentaati Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 tahun 2013 tentang kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kecamatan Bangkinang. Tidak adanya kejelasan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar, tidak meratanya distribusi anggaran bagi para pelaksana kebijakan Gerakan Magrib Mengaji di Kecamatan Bangkinang serta tingginya arus globalisasi di Kecamatan Bangkinang yang menggerus kebudayaan Masyarakat di Kecamatan Bangkinang.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 tahun 2013 tentang kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji dipengaruhi beberapa faktor yaitu faktor isi kebijakan dimana adanya kepentingan dari kelompok sasaran terutama masyarakat di kecamatan Bangkinang sehingga peraturan daerah tersebut tidak terlaksana maksimal, tipe manfaat diperlukan untuk melihat sejauh mana afektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 tahun

2013 Tentang Kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kecamatan Bangkinang, daerahat perubahan yang di inginkan merupakan faktor yang mmpengaruhi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 tahun 2013 tentang kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji, dan letak pengambilan kerutusan serta masyarakat yang dilibatkan. Lingkungan Implementasi terdiri dari Kekuasaan, kepentingan, dan Strategi aktor yang terlibat, serta karakteristik Lembaga dan Penguasa juga merupakan faktor yang mempengaruhi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 tahun 2013 tentang kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kecamatan Bangkinang.

DAFTAR RUJUKAN

- Affan Gaffar. 2009. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi* Yoyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- AG. Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (konsep.teori dan aplikasi)*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada. University Press.
- Islamy, M. Irfan. 2003. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: BumiAksara
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*, Bandung, Alfabeta.
- Solichin Abdul Wahab. 2005. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke ImplementasiKebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2002.*Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.
- _____. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*.